



GERAKAN MAHASISWA DALAM BENTUK DEMONSTRASI SEBAGAI BAGIAN DARI DEMOKRASI PADA MASA ORDE BARU

Habib Bunajar^{1*}, Novia Wahyu Wardhani²

^{1,2}Universitas Negeri Semarang

Email: bunajarhabibb@students.unnes.ac.id¹, noviawahyu@mail.unnes.ac.id²

*Korespondensi Penulis

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit: 13 Januari 2023

Direvisi: 13 Februari 2023

Diterima: 1 April 2023

Kata Kunci:

demokrasi,
demonstrasi,
mahasiswa

Keywords:

*democratic,
demonstration,
students*

Abstrak

Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi artinya masyarakat berhak ikut serta dalam pengambilan keputusan oleh pemerintahan baik secara langsung atau melalui wakil masyarakat. Apabila pemerintah melenceng dari yang semestinya, masyarakat harus berani menyuarakan aspirasinya. Untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, para mahasiswa akan berkorban untuk turun ke jalan memprotes pemerintah. Misalnya pada masa Orde Baru, banyak sekali penyimpangan- penyimpangan yang terjadi saat itu. Maka mahasiswa pada saat itu turun ke jalan demi memperjuangkan keinginan rakyat. Hingga akhirnya perjuangan mahasiswa membuahkan hasil dengan hengkangnya Presiden Soeharto dari kursi presiden pada tahun 1998.

Abstract

Indonesia is a democratic country. Democracy means that the community has the right to participate in decision-making by the government either directly or through community representatives. If the government deviates from what it should be, the people must dare to voice their aspirations. To voice the aspirations of the community, the students will make sacrifices to take to the streets to protest against the government. For example, during the New Order era, there were many deviations that occurred at that time. So the students at that time took to the streets to fight for the people's wishes. Until finally the student struggle paid off with the departure of President Soeharto from the presidency in 1998.

© 2023 Universitas Pendidikan Ganesha

✉ Alamat korespondensi:

Universitas Pendidikan Ganesha

*Korespondensi Penulis

P-ISSN : 2714-7967

E-ISSN : 2722-8304

PENDAHULUAN

Menurut Abraham Lincoln, Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Artinya, seluruh warga negara mempunyai hak yang sama dalam pengambilan keputusan untuk mengatur kehidupan. Demokrasi memperbolehkan warga negaranya ikut serta baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan

hukum. Secara etimologis, demokras (dari bahasa Yunani) berasal dari dua kata yaitu demos (rakyat) dan cratein atau cratos (kekuasaan dan kedaulatan). Kombinasi antara kata demos dan cratos membentuk kata demokrasi yang memiliki pengertian umum sebagai suatu bentuk pemerintahan rakyat (government of the people), kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui para wakil mereka melalui proses pemilihan yang berlangsung.

Negara yang menggunakan sistem demokrasi ini mengutamakan kedaulatan tertinggi pada kemauan rakyat, sehingga keputusan- keputusan pemerintah dalam menentukan arah bangsa harus berdasarkan keinginan rakyat (Abdul Rohman, 2020).

Indonesia adalah negara hukum, karena negara Indonesia berdiri di atas hukum yang menjaga keadilan warganya. hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tujuan hukum adalah untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat. Dari tujuan hukum tersebut, maka segala kehidupan bernegara perlu memperhatikan hukum, baik pemerintah maupun masyarakat. UUD 1945 yang merupakan konstitusi tertulis, memuat kebebasan berkumpul, menyampaikan pendapat secara lisan atau tulisan, dan sebagainya. Hal ini tentu menjadi fondasi kuat bahwa negara Indonesia menjamin hak masyarakatnya untuk menyampaikan aspirasi. Salah satu bentuk penyampaian aspirasi yang sering berlangsung yaitu aksi demonstrasi atau unjuk rasa.

Aksi unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian aspirasi yang dilakukan di ruang publik dan bagian dari perwujudan demokrasi bangsa Indonesia. Dalam konsep demokrasi, masyarakat bebas menyampaikan aspirasi, pendapat, dan melakukan kritik-kritik atas ketidakpuasan terhadap pemerintahan. Mahasiswa seringkali mendominasi dalam berbagai macam aktivitas demonstrasi. mereka selalu berusaha mewujudkan ekspresinya melalui kegiatan- kegiatan yang dapat mewakili pendapat- pendapatnya, termasuk dalam hal penyampain pendapat di ruang dalam bentuk aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Demonstrasi dilakukan atas respons terhadap isu-isu terkini yang dianggap akan merugikan masyarakat dan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Mengutip dari Shopback.co.id, ada 5 demonstrasi besar-besaran yang telah terjadi di Indonesia. Diantaranya yaitu demo tritura pada tahun 1966, demo malari pada tahun 1974; demo reformasi pada tahun 1998; demo buruh pada tahun 2012; dan demo kasus Ahok pada 4 November 2016. Peristiwa-peristiwa ini terjadi karena adanya penyimpangan keputusan pemerintah terhadap hukum yang ada, sehingga timbul perlawanan dari masyarakat. Aksi demonstrasi yang baru saja terjadi yaitu pada tanggal 28 Maret dan 11 April 2022 di depan Gedung DPR, yang dilakukan oleh gabungan mahasiswa dari seluruh Indonesia.

Dikutip dari detiknews.com, mereka membawa 4 tuntutan untuk DPR, diantaranya yaitu:

- a. Meminta DPR agar mendengarkan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.
- b. Menuntut DPR agar menerima tuntutan aksi pada 28 Maret hingga 11 April 2022.
- c. Menuntut DPR untuk tidak mengingkari konstitusi negara dengan melakukan amandemen, dan menolak gagasan presiden 3 periode atau penundaan pemilu.
- d. Menuntut DPR untuk menyampaikan kajian dan 18 tuntutan mahasiswa kepada Presiden yang saat ini belum terjawab.

Demonstrasi tidak mungkin dilakukan jika tidak ada permasalahan yang timbul.

Sebagai negara demokrasi, masyarakat harus berani menyuarakan pendapatnya. Melalui mahasiswa, mereka menggerakkan massa untuk melakukan aksi penolakan terhadap beberapa gagasan dari wakil rakyat. Beberapa gagasan tersebut yaitu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode dan penundaan pemilu 2022. Gagasan tersebut ditolak masyarakat karena dianggap mengkhianati konstitusi dan melanggar demokrasi.

Berdasarkan isu-isu yang ada sehingga terjadi demonstrasi, penulis sangat tertarik melakukan penelitian dengan topik Pandangan mahasiswa terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan pada tanggal 11 April 2022. Diharapkan hal ini dapat

menjadikan sebuah temuan yang bermanfaat bagi pembaca, baik peneliti, praktisi, maupun masyarakat secara umum dalam menanggapi serta mengkaji mengenai gejala demokrasi yang dengan ragam kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka stabilitas nasional maupun keselamatan dan kesehatan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis menggunakan metode pengumpulan data dengan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mencari sumber referensi online di berbagai situs penyedia artikel, jurnal, buku, dan referensi lain yang berkaitan dengan topik yang diangkat penulis. Setelah referensi terkumpul, akan digunakan untuk membantu dalam penyusunan hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang meyakinkan. Teknik ini digunakan karena membutuhkan waktu singkat dan biaya yang sedikit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivis mahasiswa adalah mahasiswa yang selalu aktif dalam kegiatan kampus, mereka selalu ikut serta dalam kegiatan yang ada di dalam kampus maupun di luar kampus (Nur Baity, Anni: 2016). Misalnya saat di dalam kampus mereka aktif mengikuti diskusi- diskusi saat perkuliahan, tetapi mereka juga aktif dalam kegiatan di luar kampus, seperti demonstrasi karena mahasiswa berperan sebagai agent of change. terlebih ketika pemerintahan telah dinilai buruk atau melenceng dari jalannya, biasanya mahasiswa akan berada di garda terdepan melakukan aksi demonstrasi ke jalan. Mahasiswa dengan semangat dan sifat kritisnya akan melakukan demonstrasi dan menuntut terjadinya perubahan. Setiap ada sesuatu yang kurang sesuai di pemerintahan, mahasiswa pasti turun tangan dan segera ke jalan untuk melakukan perubahan.

Pengertian demonstrasi atau unjuk rasa menurut UU Nomor 9 Tahun 1998 adalah, suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih, untuk menyampaikan ide atau pikiran secara lisan, tulisan dan sebagainya dengan cara demonstratif dimuka umum. Jadi demonstrasi sudah sangat jelas ketentuannya di undang-undang, para demonstran mengemukakan pendapat dan aspirasi dari masyarakat yang menurut mereka harus didengarkan oleh pemerintah. Namun saat ini, demonstrasi terkadang dinilai sebagai bentrokan, berteriak teriak, membakar ban, dan aksi anarkis. Pandangan masyarakat pun menjadi tidak baik terhadap aksi demonstrasi karena tindakan demonstran yang kerap meresahkan.

Demonstrasi dianggap sebuah cara bagi orang lemah yang terhalangi untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak yang kuat. Mahasiswa merupakan harapan besar bagi masyarakat untuk berperan besar dalam memajukan negara, karena mahasiswa merupakan agents of change. Untuk meneruskan kepemimpinan, mahasiswa harus selalu kritis dan peka terhadap segala isu yang ada di sekitarnya. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk menjalankan perannya tersebut adalah dengan ikut berpartisipasi dalam demonstrasi.

Mereka adalah mahasiswa yang sadar untuk berkontribusi membangun bangsa dan negara dengan bekal dari Pendidikan dari kampus.

Kehidupan suatu bangsa dan negara tidak dapat lepas dari kaum terpelajarnya, kaum terpelajar adalah kaum yang bisa memajukan bangsa dan negara, terutama mahasiswa. Begitu pula kehidupan bangsa dan negara Indonesia tidak dapat lepas dari pergerakan demonstrasi mahasiswanya. Gerakan demonstrasi yang dilakukan mahasiswa tidak bisa dianggap remeh, karena berpengaruh dalam kehidupan politik di Indonesia. Misalnya saja demonstrasi pada tahun 1998.

Pada tanggal 11 September 1966, Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret kepada Soeharto untuk menstabilkan negara dan melindungi Soekarno sebagai presiden. Namun pada 12 September 1966, Soeharto

menyalahgunakan Supersemar untuk melengserkan Soekarno. Setahun kemudian Soeharto diangkat menjadi presiden oleh MPRS. Pada saat itulah masa orde baru dimulai. Di awal Orde Baru, pemerintah memiliki agenda-agenda politik tersendiri guna menjalankan pemerintahannya untuk menjaga kesatuan NKRI. Salah satu yang dilakukan Soeharto adalah mencari dukungan dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Dwifungsi ABRI diperkuat pada masa itu. ABRI ditempatkan sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan (hankam) dan sekaligus sebagai kekuatan politik. Oleh karena itu pada masa Orde Baru mayoritas jabatan pemerintahan, mulai dari menteri, gubernur, bupati, walikota, hingga kepala desa dijabat oleh personel ABRI. Dengan begitu Soeharto mendapatkan dukungan politik yang penuh dari ABRI.

Selama Orde Baru terjadi gaya sistem politik corporatic dan bureaucreatik authoritarian. Dalam sitem politik ini, masyarakat tidak bisa ikut berpartisipasi dalam politik di ruang publik. Ruang publik, dikendalikan oleh rezim berkuasa yang terdiri atas lembaga kepresidenan dan militer (Rahman, Abdul 2022: 142). Kemudian pada tahun 1974, terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga timbul aksi protes mahasiswa untuk menyuarakan aspirasinya (Jubaedah, Siti 2019: 28). Demonstrasi pada saat itu juga menuntut pemberantasan korupsi. Lalu lahirlah Gerakan “Mahasiswa Menggugat” yang dipimpin oleh Arif Budiman, yang tujuannya adalah mengkritik pemerintah atas kenaikan BBM dan korupsi. Sebelumnya di tahun 1972 mahasiswa juga telah memprotes pemerintah terhadap pemborosan anggaran negara yang digunakan untuk proyek-proyek yang dianggap tidak penting.

Keikutsertaan Jepang dalam ekonomi Indonesia saat itu semakin membuat golongan mahasiswa memprotes rezim. Aksi demonstrasi terus berlanjut saat itu. Hingga

puncaknya aksi saat Perdana Menteri Jepang kaukei Tanaka datang ke Indonesia pada 15 Januari 1974 memicu kerusuhan di ibukota (Siti Jubaedah, 2019: 29). Para mahasiswa bersama masyarakat miskin membakar ratusan mobil dan gedung, serta merampas toko yang menjual produk Jepang. Peristiwa ini disebut Malari (Malapetaka januari). Setelah peristiwa tersebut, aksi protes mahasiswa mulai sepi.

Menjelang Pemilu 1977, muncul kembali pergerakan mahasiswa yang cukup besar. Berbagai isu penyimpangan politik terkait pemilu seperti pelaksanaan kampanye, pengrusakan tanda gambar, metode perekrutan anggota legislatif, pemilihan gubernur dan bupati, strategi pembangunan, dan isu-isu kecil lainnya. Strategi pembangunan dan kepemimpinan nasional juga dikritik dalam gerakan ini. Gerakan mahasiswa yang terus berlanjut dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah. Kemudian pemerintah menerapkan kebijakan NKK (Normalisasi kehidupan kampus). Kebijakan ini mewajibkan mahasiswa menyelesaikan beban studi setiap semester. Soeharto pun terpilih lagi menjadi presiden. Aksi mahasiswa masih belum membuahkan hasil.

Gerakan mahasiswa besar-besaran terjadi pada tahun 1998. Krisis moneter atau Krismon

1998 merupakan salah satu penyebab mahasiswa turun ke jalan menuntut agar Soeharto lengser sebagai presiden setelah tiga dekade. Peristiwa merupakan momen paling menyedihkan bagi kehidupan politik dan ekonomi Indonesia, seluruh negeri kacau akibat peristiwa tersebut. Nilai mata uang rupiah anjlok dan perekonomian rakyat morat-marit. Beberapa negara di Asia juga mengalami krisis moneter, seperti Thailand dan Korea Selatan. Namun dibanding negara-negara lain, Indonesia dianggap negara yang ekonominya paling terdampak.

Menurut (Nirma Kusumaning, 2013), ada tiga faktor penyebab terjadinya krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998. Pertama adalah lemahnya sistem keuangan nasional. Lembaga keuangan khususnya perbankan merupakan salah satu aset penting pemasukan modal asing ke dalam negeri. Setelah pemerintah melakukan deregulasi hampir di seluruh aspek perekonomian nasional sejak dasawarsa 1980-an, pemasukan modal asing semakin bertambah besar. Adanya deregulasi industri perbankan itu tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimplementasikan aturan industri keuangan.

Atas isu-isu yang tak kunjung terselesaikan, mahasiswa semakin maju memprotes pemerintah. Hingga puncaknya pada tanggal 12 Mei 1998, empat mahasiswa Trisakti yaitu Elang Mulia Lesmana, Hery Hartanto, Hendriawan Sie, dan Hafidin Royan ditembak oleh aparat saat demo di depan kampus. Insiden tersebut memancing kemarahan masyarakat Indonesia pada 13-15 Mei 1998. Mahasiswa Bersama masyarakat terus-menerus melakukan demo ke gedung DPR/MPR untuk tujuan reformasi total dan melengserkan Soeharto sebagai presiden karena dinilai gagal mengatasi masalah perekonomian negara. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto secara resmi mundur dari jabatan presiden dan menyerahkan mandate kepada B.J. Habibie untuk menjadi presiden ke-3. Dari rentetan peristiwa tersebut, disimpulkan bahwa Gerakan mahasiswa dapat berpengaruh besar terhadap politik negara.

PENUTUP

Indonesia adalah negara dengan system pemerintahan demokrasi. Pada masa orde baru, presiden Soeharto memimpin negara dengan gaya otoriter. Soeharto mengeluarkan kebijakan sesuai keinginannya sendiri tanpa memikirkan aspirasi dari rakyatnya. Bahkan rakyat yang berusaha mengkritik pemerintahan akan dibungkam oleh pemerintah. Demokrasi hanya tinggal nama pada saat itu. Namun mahasiswa tetap bersikeras menyuarakan aspirasi masyarakat dengan turun ke jalan. Hingga kekacauan bertambah parah ketika dunia dilanda krisis ekonomi moneter. Mahasiswa pun bertambah kuat melawan pemerintahan. Aksi protes mahasiswa pun pecah dengan menduduki Gedung DPR/MPR. Hingga akhirnya presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Selanjutnya di masa kepemimpinan B.J. Habibie disebut masa Reformasi, demokrasi kembali ditegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Rohman, Abdul. "Sisi Positif dan Negatif Demonstrasi pada Negara Demokrasi Dimasa Pandemi." *Binamulia Hukum*, vol. 9, no. 2, 2020, pp. 153-170, doi:[10.37893/jbh.v9i2.125](https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.125).
- Rosana, Ellya. "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, vol. 12, no. 1, 2016, doi:[10.24042/tps.v12i1.827](https://doi.org/10.24042/tps.v12i1.827).
- Renhoard, John M. "Politik Identitas Era Orde Baru di Indonesia Memasuki Era Reformasi." *Societas Dei*, vol. 6, no. 1, 2019, doi:[10.33550/sd.v6i1.111](https://doi.org/10.33550/sd.v6i1.111).
- Abdul Rahman. "Partisipasi Masyarakat Sipil Dalam Gerakan Reformasi 1998 Di Indonesia". *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, vol. 1, no. 3, Mar. 2022, pp. 139-50, <http://ulilalbabinstitute.com/index.php/J-CEKI/article/view/211>.
- Jubaedah, Siti. "Gerakan Mahasiswa (Kajian tentang Peranan Mahasiswa Universitas Trisakti Pada Mei 1998 dalam Proses Pergantian Kekuasaan Orde Baru)". *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 8, No. 2, 2019, <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/criksetra/article/view/9245/4981>
- Tyas, Nurmi Kusumaning (2013) "Dinamika Ekonomi Pabrik Gula Sumberharjo Pemalang Pada Tahun 1985-2005". S1 thesis, Fakultas Ilmu Sosial, <https://eprints.uny.ac.id/18167/>
- Ismawati (2012). "Tragedi Trisakti 12 Mei 1998 Dan Berakhirnya Rezim Orde Baru". S1 thesis, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/8339>
- <https://www.shopback.co.id/katashopback/5-demonstrasi-di-indonesia-ini-tercatat-sebagai-yang-terbesar>